

Gagasan Kebijakan Dukungan Pembangunan Pariwisata Bahari Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

Ahmad Prawira Dhahiyat¹, Fanny Kristiadhi², Nur Sakinah Junirahma³, Shafira Bilqis Annida⁴

¹²³⁴Pariwisata Bahari, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

e-mail: ¹ahmad.prawira@unpad.ac.id, ²fanny.kristiadhi@unpad.ac.id, ³sakinah.junirahma@unpad.ac.id, ⁴shafira.bilqis@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pulau Pari memiliki potensi wisata bahari yang sangat memukau, namun diperlukan kebijakan yang optimal untuk mendukung perkembangan pariwisata di Pulau Pari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pariwisata di Pulau Pari sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan guna mencapai pengembangan pembangunan pariwisata bahari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara dengan sejumlah wisatawan, dan masyarakat lokal Pulau Pari. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer melalui survei dan wawancara semi-terstruktur kepada wisatawan, pengelola wisata dan masyarakat lokal dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terdahulu, serta studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam merancang kebijakan yang efektif dan keberlanjutan dengan melihat pada pengelolaan destinasi wisata oleh pemerintah, stakeholder, dan masyarakat, meningkatkan pemasaran promosi pariwisata menjadikan masyarakat pulau pari, penegakan serta pengawasan hukum

Kata kunci:

Pariwisata; Pembangunan; Pulau Pari; Wisata Bahari; Kebijakan

ABSTRACT

Pari Island has stunning marine tourism potential, but an optimal policy is needed to support the development of tourism on Pari Island. The purpose of this study is to determine the implementation of tourism policies on Pari Island so that it can provide recommendations for future policy improvements in order to achieve the development of marine tourism development. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach by conducting interviews with a number of tourists, and local people of Pari Island. The data obtained in this study are primary data through surveys and semi-structured interviews with tourists, tourism managers and local communities to tourists, tourism managers and local communities and secondary data obtained from previous research, as well as literature studies. The results of this study indicate that there is a need for synergy between the government, local communities, and the private sector in designing effective and sustainable policies by looking at the management of tourist destinations by the government, stakeholders, and the community, increasing tourism promotion marketing, welfare of the Pari Island community, law enforcement and supervision.

Keywords:

Development; Marine Tourism; Pari Island; Policy; Tourism

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan yang luas dikelilingi dengan pulau-pulau dan dua samudera yang luas. Indonesia merupakan bangsa bahari dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari. Salah satu wilayah yang sangat potensial adalah Kepulauan Seribu, sebuah wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 100 pulau yang tersebar di Laut Jawa. Wilayah ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dan keanekaragaman hayati yang tinggi, membuatnya sangat populer bagi wisatawan domestik dan internasional. (Bakuheling, 2019)

Namun, pengembangan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu juga memerlukan kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengatur pengembangan industri ini, serta memastikan bahwa pengembangan ini berkelanjutan dan berbasis pada kepedulian terhadap lingkungan. Evaluasi kebijakan yang

sistematis dan berbasis pada data adalah sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu. (Agustino, 2006)

Permasalahan juga timbul secara administrasi hukum terdapat suatu kondisi sengketa tanah di Pulau Pari. Persoalan tersebut berasal pada tahun 2014, ketika PT. Bumi Pari Asri mengklaim 90% kepemilikan tanah tempat tinggal masyarakat Pulau Pari adalah milik perusahaan konsorsium. Kepemilikan tanah di Pulau Pari sebagian besar merupakan tanah giring atau tanah adat. Setelah diselidiki, permasalahan ini berakar pada maladministrasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam menerbitkan 62 SHM dan 14 SHGB atas nama PT Bumi Pari Asri di Pulau Pari. Salah satunya karena proses pengukuran tidak diinformasikan atau tidak diketahui oleh warga Pulau Pari, atau yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah tersebut. Hasil pengukuran atau daftar peta

bidang tanah juga tidak diumumkan sehingga warga Pulau Pari tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatan, sehingga tanah tersebut telah berubah menjadi hak guna usaha (HGU) yang dipegang oleh PT. Bumi Pari Asri dan PT. Bumi Griya Nusa. (Fitriana et al, 2018)

Permasalahan maladiministrasi ini pada akhirnya ditangani secara hukum (Martini, 2020) dan telah selesai. Namun, setelah kasus ini, terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka dan mengupayakan pengembangan pariwisata di Pulau Pari, karena dikhawatirkan konflik serupa dapat terjadi. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam mendampingi pengembangan sektor pariwisata sangat dibutuhkan

Evaluasi kebijakan merupakan proses penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari suatu kebijakan atau program. Konsep dasar evaluasi kebijakan melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penilaian untuk memahami sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya serta untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Secara umum, Evaluasi kebijakan dapat membantu pemerintah dalam memahami dampak kebijakan yang diterapkan dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. (Bemelmans-Viduc et al, 2011)

Dalam konteks evaluasi kebijakan pariwisata, terdapat beberapa teori yang relevan yang digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap sektor pariwisata. Salah satunya adalah teori pengukuran efisiensi, yang mengacu pada evaluasi sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam kebijakan pariwisata (seperti anggaran dan tenaga kerja) mampu menghasilkan hasil yang diinginkan, seperti peningkatan kunjungan wisatawan atau pendapatan daerah. Penggunaan teori ini membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan dari kebijakan pariwisata yang diimplementasikan. (Suardana, 2013)

Teori lain yang relevan adalah teori efektivitas kebijakan, yang menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang diinginkan dari kebijakan pariwisata dapat dicapai. Hal ini mencakup evaluasi terhadap strategi promosi pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, dan kebijakan dukungan terhadap industri pariwisata lokal. Evaluasi efektivitas ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berdampak positif secara ekonomi tetapi juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan, serta melestarikan kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata. (Dunn, 2003)

Secara khusus, dalam konteks pariwisata bahari di Kepulauan Seribu, evaluasi kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Teori-teori seperti evaluasi dampak lingkungan (*Environmental Impact Assessment*) menjadi relevan untuk menilai pengaruh kebijakan

pariwisata bahari terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat lokal. Penggunaan teori-teori ini membantu mengidentifikasi potensi dampak negatif dan merancang strategi mitigasi yang tepat. Evaluasi kebijakan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan harus mempertimbangkan faktor-faktor lokal seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Pariwisata bahari adalah industri yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, polusi, dan konflik sosial. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pariwisata bahari harus mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam menilai kualitas dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan pariwisata bahari harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. (Andriyanti, 2016)

Evaluasi kebijakan juga perlu memperhatikan teori keadilan sosial. Hal ini penting karena pengembangan pariwisata yang tidak seimbang dapat meningkatkan kesenjangan sosial antara masyarakat lokal yang terlibat langsung dengan industri pariwisata dan mereka yang tidak. Evaluasi ini akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan pariwisata bahari telah menghasilkan manfaat sosial yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan lapangan kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata. Selain itu, teori partisipasi publik juga relevan dalam evaluasi kebijakan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu. (Fauzi et al, 2002)

Evaluasi kebijakan pariwisata bahari harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan mempertimbangkan kepentingan mereka dalam pengembangan industri pariwisata bahari (Suryadi, 2018) Perlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata tidak hanya meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan tersebut tetapi juga memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul serta solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Evaluasi ini membantu menilai sejauh mana partisipasi masyarakat lokal telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata bahari, serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan dimana pariwisata bahari juga termasuk kedalam lini perlindungan sebagai *Marine Protected Area* (Alder et al, 2002)

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu perlu memanfaatkan konsep dasar dan teori-teori evaluasi kebijakan secara holistik. Dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, keadilan sosial, partisipasi publik, dan dampak lingkungan, evaluasi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan pariwisata bahari, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan guna mencapai

pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut. (Wall, 1997) Pengembangan pariwisata juga dikembangkan melalui basis-basis dari perencanaan pariwisata secara mendasar. Penegasan perencanaan pariwisata dilihat juga ke dalam beberapa komponen, yaitu pembangunan manusia, peningkatan ekonomi secara inklusif, serta lingkungan sebagai pemanfaatan sumber daya yang dikembangkan sebagai destinasi wisata (Gunn et al, 2002) Penelitian ini bertujuan untuk merancang gagasan kebijakan dalam mendukung pembangunan pariwisata bahari di pulau Pari berdasarkan bentuk partisipasi, luaran, maupun argumentasi dari masyarakat setempat hingga pengelola wisata setempat

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada 7 - 8 Juni 2024 berlokasi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif untuk memperoleh data yang apa adanya (Anwar, 2011) Data diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara terhadap masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, dan wisatawan sejumlah 30 informan melalui survei dan wawancara semi-terstruktur. Pemerolehan data sekunder diperoleh melalui jurnal, dokumen, maupun penelitian terdahulu yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bahari di Pulau Pari, Kepulauan Seribu

Pengembangan pariwisata bahari di Pulau Pari umumnya melibatkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan menyediakan pengalaman wisata yang bermutu bagi pengunjung. Berikut adalah beberapa kebijakan yang sering diterapkan dalam pengembangan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu:

1. Penetapan zona-zona khusus untuk kegiatan wisata, seperti snorkeling, diving, dan aktivitas air lainnya. Zonasi ini membantu mengelola penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan melindungi ekosistem terumbu karang serta biota laut lainnya.
2. Pembatasan jumlah kunjungan wisatawan dalam satu waktu untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas pengalaman wisata. Hal ini bisa melibatkan sistem pengaturan kuota kunjungan atau penggunaan aplikasi reservasi untuk mengatur kedatangan pengunjung.
3. Pengelolaan sampah, mendaur ulang, dan mengelola sampah secara efektif di pulau-pulau dan perairan sekitar. Program pembersihan pantai, penggunaan tempat sampah yang tepat, dan edukasi lingkungan kepada pengunjung adalah bagian dari strategi ini.

4. Edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya konservasi lingkungan, perlindungan terumbu karang, dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kelestarian alam.
5. Meningkatkan ekonomi lokal melalui pariwisata, misalnya dengan pengembangan produk dan jasa pariwisata lokal yang berkelanjutan dan mendukung kebudayaan serta warisan lokal.

Dampak Kebijakan Pariwisata di Pulau Pari

Dampak kebijakan pembangunan pariwisata di pulau menimbulkan peranan untuk berbagai sektor yang dimana memberikan sumbangsih, baik secara positif dan negatif. Berikut dampak kebijakan pariwisata yang ditimbulkan pada Pulau Pari:

1. Peningkatan Ekonomi
Kebijakan pariwisata telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat lokal. Mayoritas penduduk yang diwawancara, hasil dari responden menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sumber utama mata pencaharian. Kebijakan pemerintah yang mendukung pariwisata membantu meningkatkan pendapatan dan membuka peluang usaha baru sehingga kebijakan pariwisata telah meningkatkan jumlah UMKM dan peluang kerja di pulau tersebut.
2. Partisipasi dan Komunitas
Hasil dari responden menyebutkan bahwa masyarakat lokal merasa dilibatkan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pariwisata. Ini memperkuat rasa kebersamaan dan kerjasama antar masyarakat. Adanya musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dinilai positif oleh berbagai responden karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersuara dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pariwisata.
3. Infrastruktur dan Sarana Pendukung
Perbaikan infrastruktur yang dilihat dari pembangunan dermaga dan fasilitas umum, mendapat apresiasi dari warga merasakan perubahan positif di Pulau Pari sejak tahun 2023
4. Pengelolaan Lingkungan
Beberapa responden menyatakan kekhawatiran mengenai masalah sampah dan kebersihan di Pulau Pari. Banyak wisatawan membuang sampah sembarangan sehingga berdampak negatif pada kebersihan pantai dan laut.
5. Sosial dan Budaya
Hasil dari responden menyebutkan adanya dampak sosial dari masuknya wisatawan, seperti akulturasi budaya dan perubahan cara berpakaian masyarakat lokal yang meniru wisatawan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan perubahan

budaya lokal. Meski demikian, interaksi dengan wisatawan juga membawa dampak positif berupa peningkatan kemampuan bersosialisasi dan adaptasi masyarakat lokal.

6. Transportasi

Jadwal kapal yang tidak menentu dan frekuensi yang terbatas menjadi masalah utama yang diangkat oleh beberapa responden sebagai pengelola akomodasi wisata dan pekerja pariwisata. Hal ini menyulitkan pergerakan wisatawan dan masyarakat lokal. Urgensi terkait transportasi menekankan bahwa pentingnya evaluasi kebijakan terkait transportasi laut untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan.

7. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Meskipun banyak yang merasa dilibatkan dalam musyawarah, beberapa responden merasa bahwa keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih kurang optimal. Diharapkan terdapat peningkatan dalam transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan.

8. Pemasaran Pariwisata

Beberapa responden menyoroti kurangnya promosi pariwisata Pulau Pari, baik di tingkat nasional maupun internasional. Responden menyarankan adanya upaya yang lebih agresif dalam pemasaran melalui media digital dan pameran wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Peran Pemerintah dan Masyarakat Lokal dalam Perancangan Kebijakan

Peran pemerintah dan masyarakat lokal sangat penting dalam perancangan kebijakan pengembangan pariwisata bahari di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Berikut adalah peran pemerintah dan masyarakat lokal yang masing-masing memiliki dampak signifikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata tersebut:

1. Pemerintah

Pemerintah sangat berperan penting dalam perancangan kebijakan pengembangan pariwisata bahari di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, berikut merupakan peran pemerintah dalam perancangan kebijakan:

- Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu. Ini meliputi zonasi wisata, pembatasan kapasitas kunjungan, pengelolaan lingkungan, dan pemberian izin usaha pariwisata.
- Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk memastikan

bahwa kegiatan pariwisata dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal lingkungan dan kualitas layanan kepada pengunjung.

- Pemerintah dapat memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan pariwisata. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan program pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di sektor pariwisata.
- Pemerintah dapat memainkan peran dalam promosi pariwisata Kepulauan Seribu secara luas, baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya.

2. Masyarakat Lokal

Tidak kalah penting dari pemerintah masyarakat lokal juga memiliki peran yang sangat penting dalam perancangan kebijakan pengembangan pariwisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu karena masyarakat lokallah yang menghadapi segala tantangan yang ada secara langsung, berikut adalah peran masyarakat lokal dalam perancangan kebijakan:

- Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Masyarakat lokal dapat berperan dalam perlindungan terumbu karang, pemantauan populasi biota laut, dan kegiatan konservasi lingkungan lainnya.
- Masyarakat lokal dapat mengembangkan produk dan jasa pariwisata yang unik dan berkelanjutan, seperti kerajinan tangan, kuliner lokal, dan tur budaya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada penduduk setempat.
- Masyarakat lokal dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di antara wisatawan dan rekan-rekan mereka sendiri. Masyarakat lokal dapat mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlanjutan pariwisata jangka panjang.
- Melalui organisasi komunitas dan dialog dengan pemerintah, masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Ini termasuk memberikan masukan tentang kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka dan lingkungan tempat tinggal.

Gagasan Kebijakan Dukungan Pembangunan Pariwisata Bahari Di Pulau Pari

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan pariwisata di Pulau Pari yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan dan keberlanjutan pariwisata di Pulau Pari, diantaranya:

1. Pengelolaan Destinasi Wisata oleh Pemerintah, Stakeholder, dan Masyarakat
 - a. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, stakeholder serta masyarakat agar Pulau Pari ini dapat lebih maksimal dalam pengelolaan peraturan, jadwal kapal, ketersediaan peta wisata maupun fasilitas umum.
 - b. Meningkatkan intensitas musyawarah/forum untuk membahas mengenai pengelolaan Pulau Pari antara pemerintah dengan masyarakat.
 - c. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang telah direkomendasikan.
 - d. Pembuatan pelatihan maupun pendidikan untuk masyarakat agar dapat menghasilkan
2. Meningkatkan Pemasaran serta Promosi Pariwisata:
 - a. Pembuatan promosi wisata Pulau Pari melalui media sosial
 - b. Pembuatan akun media sosial Pulau Pari
 - c. Membuat branding yang kuat untuk promosi pariwisata Pulau Pari yang kaya akan keindahan wisata baharinya
 - d. Media promosi yang disebarluaskan kepada masyarakat umum.
3. Menyejahterakan Masyarakat Pulau Pari
 - a. Melakukan program pelatihan untuk SDM Pariwisata di Pulau Pari
 - b. Mengembangkan UMKM di bidang ekonomi kreatif masyarakat pulau Pari
 - c. Melakukan pendampingan kepada badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat pulau Pari
 - d. Meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan bagi masyarakat Pulau Pari
4. Penegakan serta Pengawasan Hukum
 - a. Melakukan penegakan hukum di kawasan wisata pulau Pari agar menciptakan lingkungan wisata yang aman
 - b. Memberikan pengawasan hukum bagi kegiatan wisatawan maupun masyarakat setempat
 - c. Menindak secara tegas segala tindak kejahatan, kriminilitas, maupun kekerasan di Pulau Pari
 - d. Sinergitas antara pihak Polri, TNI, beserta kelompok sadar wisata dalam segi pengawasan kegiatan wisatawan dan masyarakat lokal setempat

D. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Pari cenderung masih kurang terkoordinasikan dengan baik, menyebabkan ketidakseimbangan antara pengembangan pariwisata dan regulasi yang ada. Misalnya kebijakan kapal laut yang kurang diperhatikan dan kurangnya regulasi yang jelas mengenai lingkungan. Partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata masih rendah, meskipun mereka juga merasakan dampak langsung dari aktivitas pariwisata.

Disisi lain, pariwisata bahari telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, infrastruktur dan fasilitas pariwisata di Pulau Pari masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan dari pembangunan pariwisata di Pulau Pari, perlu ditingkatkannya koordinasi antar pihak terkait, penguatan regulasi lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan membangun pariwisata, serta pengembangan infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah: 1) Memperkuat koordinasi antar pihak dan stakeholder terkait dalam pengelolaan pariwisata bahari di Pulau Pari, 2) Memperkuat regulasi lingkungan untuk memastikan kelestarian alam di Pulau Pari, 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, 4) Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di Pulau Pari, 5) Melakukan evaluasi kebijakan pariwisata bahari secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya, 6) Penelitian selanjutnya dapat menerapkan penelitian berbasis pengembangan destinasi pariwisata bahari serta pengembangan keamanan dan keselamatan wisata pada subjek penelitian yang sama untuk memperkaya kajian dan urgensi atas pulau Pari yang masih membutuhkan kajian mendalam lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 6(1), 71-78.

Alder, J., Zeller, D., Pitcher, T., & Sumaila, R. (2002). A Method for Evaluating Marine Protected Area Management. Coastal Management, 30. 10.1080/089207502753504661

Andriyanti, E. (2016). Evaluasi Kebijakan Pariwisata Bahari: Pendekatan Berbasis pada Prinsip-Prinsip Keberlanjutan. Jurnal Ilmu Administrasi, 1(1), 1-12.

Anwar, Sanusi. (2011). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Arianto, W., & Manfaat, D. (2016). Desain kapal wisata katamaran untuk Kepulauan Karimunjawa. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Surabaya.

Bahukeling, T. S et al (2019). Analisis Dampak Pariwisata Bahari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Manajemen IKM, 14(2), 158.

Bemelmans-Videc, M. L., Rist, R. C., & Vedung, E. (2011). *Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation*. Routledge.

Chairani, R. N., & Suliyati, T. (2017). Pemanfaatan Arsip Tanah dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3).

Christian, Y., Satria, A., & Sunito, S. (2018). Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*,

Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan).

Fauzi, A., & Anna, A. (2002). Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi Pendekatan Rapfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta). *Jurnal Pesisir dan Lautan*, 4, 43-55.

Fitriana, N. N., Nugroho, K. S., & Hikmawan, M. D. (2018). Persebaran Konflik Sengketa Tanah Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Gunn, Clare A. and Var. (2002). *Tourism Planning: Basics Concepts Cases*. London : Routledge.

Kurniawan, R. A., & Rafika, M. (2018). Analisis Dampak Pariwisata Bahari terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. *Jurnal Manajemen Pertanian Indonesia*, 16(2), 207-216.

Makmur dan Thahier, Rohana. (2016). *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti dan Untuk Pelayanan Publik)* Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240-259.

Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. In Seminar Nasional: Unud.

Suryadi, D. (2018). Evaluasi Kebijakan Pariwisata Bahari di Kepulauan Seribu: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 2(1), 1-10

Wall, G. 1997. Sustainable Tourism-Unsustainable development. In S. Wahab & JJ. Pigram (eds.), *Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainable* (pp. 33-49). London: Routledge.